

## TAJUK RENCANA

### Dispensasi Menikah

SEPULUH orang anak berusia antara 14-18 tahun di Kulonprogo, mengajukan dispensasi menikah. Mereka menikah karena kehamilan yang tidak diinginkan. Sebenarnya bukan kali ini saja, namun tahun 2020 menurut Sub Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinsos P3A Kulonprogo, Listyani, kasus semacam ini bukan kali ini saja. Namun tahun 2020 ada 87 pasangan anak yang minta nikah, kemudian 2021 ada 64 orang (KR 13/3).

Mengapa bisa terjadi? Menurut Listyani salah satunya adalah gara-gara kebanyakan sekolah secara daring. Kejenuhan, telah membuat demikian. Memang masalahnya tentu bukan nantinya mereka akan menikah, tetapi pada usia demikian akan sangat rentan segalanya. Kelanjutan perkawinan, apalagi dalam situasi pandemi yang sangat menekan dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi akan sangat berdampak pada pasangan usia dini tersebut.

Meski hanya melalui jalur medsos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), siap mendampingi menjadi mediator bila terjadi sesuatu dampak perkawinan anak tersebut.

Usaha untuk pendampingan tersebut, memang harus dilakukan. Mengingat faktanya banyak kejadian pernikahan usia dini memberikan dampak negatif. Baik secara fisik, mental atau bahkan ekonomi. Apalagi pada saat masih diliputi pandemi seperti saat ini, disaat kondisi ekonomi masih belum menentu.

Bisa dipastikan sebagai suami atau istri, mereka ada yang tak bisa mengantunghkan semua kebutuhan hidupnya pada orangtua. Nah, mencari pekerja bagi yang masih usia anak apalagi (mungkin) tidak ada ke-trampilan khusus, maka situasi itu akan berdampak pada suasana keluarga, termasuk anak yang tentu perlu makanan dan gizi yang cukup.

Kondisi ibu atau bayi yang tidak sehat, akan sangat berdampak pada

kondisi semuanya. Risiko kurang gizi bisa berpengaruh banyak. Bahkan risiko kelahiran bayi premature, akan sangat mempengaruhi pada gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, penurunan kemampuan kognitif, cacat bawaan, berat badan, dan bahkan kematian janin.

Fakta yang kemudian terjadi, adalah kesehatan mental Pasangan. Tidak hanya berdampak bagi Kesehatan fisik, pernikahan di usia dini akan mengganggu kesehatan mental pasangan. Kondisi emosional yang belum cukup dan stabil akan sangat memungkinkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain KDRT, perceraian juga sangat mungkin terjadi.

Tentu kita berharap, hal demikian tidak akan terjadi pada anak-anak kita tersebut. Karena sebenarnya masih banyak lagi resikonya. Namun paling tidak, bisa diantisipasi segala resiko yang akan dihadapi. Yang lebih penting lagi, adalah bagaimana kita juga berusaha mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

Usaha pencegahan, diantaranya adalah deteksi dini penyebabnya. Di antaranya, saat ini mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di media sosial. Kemajuan teknologi, mudah sekali melihat situs-situs pornografi. Namun anak-anak tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini. Ini yang mungkin dimaksudkan.

Faktor lainnya, misalnya kondisi ekonomi orangtuanya. Misalnya menikahkan anaknya agar meringankan beban keluarga. Juga faktor pendidikan baik orangtua anak atau anak tersebut. Mereka hanya kemudian pasrah, dan kurang mengerti dampaknya. Bisa juga, karena faktor tradisi atau budaya. Ada tradisi yang menganggap menolak lamaran adalah tabu, padahal mungkin saja anak belum cukup umur. Maka saatnya kita introspeksi agar tidak terjadi apa yang faktanya terjadi. (\*\*\*)

**PERAIH** hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2001, Joseph E. Stiglitz berkeyakinan, bahwa kebebasan pers dan keterbukaan informasi mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good gover-* *-nance*) dan pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi yang dilakukan oleh Tim Bank Dunia menunjukkan adanya korelasi antara tingkat keterbukaan informasi dan kebebasan pers dengan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dan kebebasan media, semakin sejahtera pula masyarakatnya (Pusat Data dan Analisis Tempo & The World Bank, 2006).

Dilihat dari aspek keterbukaan informasi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) menunjukkan kecenderungan yang baik. Berdasar hasil move yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, DIY memperoleh predikat Menuju Informatif (2019), dan dua tahun terakhir (2020-2021) memperoleh predikat informatif dengan skor di atas 90. Potret informatif itu juga berkorelasi dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Jika melihat capaian 8 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan keuangannya dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, DIY dapat dikatakan bagus. Simpulan itu diperkuat oleh banyaknya penghargaan yang diterima Pemda DIY atas berbagai inovasi layanan publik yang diselenggarakan selama ini.

Hasil nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam tiga tahun terakhir IPM DIY menduduki posisi kedua setelah DKI Jakarta. Tahun 2019 IPM DIY sebesar 79,99, kemudian turun menjadi 79,97 pada 2020, tetapi kemudian naik menjadi 80,2 pada tahun 2021. IPM DIY jauh melebihi rata-rata nasional sebesar 71,92 (2019), 71,94

### Darmanto

(2020), dan 72,29 pada 2021. Indikator lain dari keberhasilan pembangunan di DIY adalah tingginya Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dan hal itu mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH DIY tahun 2021 mencapai 75,04 tahun. Hal itu merupakan level tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di



Indonesia, dan jauh melebihi rata-rata nasional sebesar 71,57 tahun (Dihni dan Mutia, 2021).

Indikator lain dari good governance adalah partisipasi publik. Dalam hal ini pun DIY tidak dapat diragukan. Dari level mana saja, dan bidang apa pun partisipasi masyarakat DIY dalam pelaksanaan pembangunan sangat tinggi. Kerja-kerja sosial baik yang sifatnya voluntiristik maupun bentuk kolaborasi dengan lembaga pemerintahan marak terjadi di seantero DIY.

#### Paradoks

Meski dari aspek keterbukaan informasi sudah cukup bagus, indikator *good governance* juga menunjukkan kecenderungan yang baik, tetapi mengapa gini ratio dan angka kemiskinan di DIY cukup

tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio atau tingkat kesenjangan pendapatan di DIY dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang konstan tinggi. Gini ratio diukur dari 0 hingga 1 sehingga semakin mendekati 1 berarti tingkat kesenjangan semakin tinggi. Hasil pengukuran periode September 2019 gini ratio DIY sebesar 0,428, sedang rata-rata nasional 0,380. September 2020 gini ratio DIY mencapai 0,437, sementara rata-rata nasional 0,385. Adapun pada September 2021 gini ratio DIY mencapai 0,436, sedang rata-rata nasional sebesar 0,381.

Selain tingginya gini ratio yang belum tertandingi oleh provinsi mana pun, fakta lain dari DIY adalah tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan publikasi BPS Januari 2022 angka kemiskinan di DIY di bulan September 2021 tercatat 11,91%. Sementara rata-rata angka kemiskinan nasional pada periode yang sama sebesar 9,71%. Jika penduduk DIY sebanyak 3.677.446 jiwa, berarti jumlah penduduk miskinnya mencapai 437.983 atau hampir setengah juta.

Adanya paradoks tersebut menimbulkan pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi di DIY? Mengapa terjadi anomali? Benarkah tesis Stiglitz bahwa tingkat keterbukaan informasi dan praktik *good governance* akan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks DIY? (\*)

\*) **Darmanto**, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Jalan Wojo Bantul Perlu Perhatian

SUDAH sering say a baca di rubrik ini, mengenai jalan rusak di daerah atau di wilayah tertentu, yang masih belum diperbaiki. Padahal kita tahu, bahwa jalanan itu adalah sarana untuk aktivitas kita semua. Mulai dari pelajar sampai pegawai dan pedagang. Jalanan yang rusak dan sempit, tentu sering menjadi masalah mereka.

Salah satunya yang kini butuh perhatian, adalah jalan wilayah Wojo, Kabupaten Bantul. Setiap lewat jalan

tersebut, harus pandai-pandai memilih menghindari lobang menganga di jalan. Sehingga bukan tidak mungkin akan membahayakan bagi kendaraan yang melewati jalan tersebut. Maka diharapkan pemerintah segera memperbaiki jalan yang sudah agak lama rusak tersebut. Sementara diharapkan masyarakat juga ikut menjaganya.

**Briptu Puti Risavi,**  
Tangkilan Rt 01, Sumbermulyo,  
Banganglipuro Bantul.

### Pudarnya Tradisi Ketan Kolak Apem

DAHULU menjelang bulan Ramadan, ada tradisi di Jawa Ruwah. Membuat makanan ketan kolak apem, yang punya makna bagus. Ada makna yang arif, dalam tradisi tersebut. Misal, ketan, kolak, dan apem memperoleh makna dengan mengaitkan nama tersebut dengan suatu kata dalam bahasa Arab. Ketan dengan kata 'Khata-an' yang berarti 'kesalahan'. Kolak dengan kata 'Kholoqo' atau sering juga dengan

kata *kholiq* atau *khaliq*. Artinya adalah 'mencipta'.

Sedang apem dengan kata 'Afwun' yang berarti 'permintaan maaf' atau 'ampunan'. Idiom yang sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan memberikan ketan kolak apem pada tetangga atau kerabat, sekarang sudah mulai memudar, banyak dilupakan. Sayang ya?

**M Sadiq, FPBS Kampus UNS,**  
Kentingan, Surakarta.

## Hari Bakti Rimbawa

TANGGAL 16 Maret 1983 oleh Kementerian Kehutanan dijadikan Hari Bakti Rimawan. Meski kini Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap memperingati hari istimewa ini setiap 16 Maret. Pada awal berdirinya RI, sektor kehutanan masih di bawah Departemen Pertanian, yaitu Bidang Kehutanan yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Departemen Kehutanan dan sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah dibuat menjadi kementerian khusus, segala hal yang berhubungan dengan area hutan dikelola oleh pemerintah, agar pemerintah dapat mengatur pemeliharaan dan pemanfaatan hutan lebih optimal. Namun kenyataannya ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan golongan. Hutan yang seharusnya menjadi sumber pemasukan bagi warga sekitar justru hanya dimanfaatkan segelintir pihak.

Setelah masa reformasi, area perhutanan dikelola oleh pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Untuk dapat mengelola kawasan hutan Indonesia yang begitu luas dan memiliki keanekaragaman hayati begitu melimpah, dibutuhkan pembelajaran panjang. Diperlukan pendidikan serta promosi terpadu dan berkesinambungan untuk mengenalkan pentingnya pelestarian hutan.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan aktivis atau lembaga lingkungan hidup di berbagai daerah untuk mensosialisasikan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian hutan. Kesadaran masyarakat harus dibangun sejak dini agar tercipta rasa tanggungjawab untuk memelihara lingkungan sekitar.

Para rimbawan juga patut dilibatkan dan diapresiasi. Berkat kerja keras mereka, hutan di Indonesia terjaga dengan baik. Adanya kerusakan hutan di berbagai wilayah tak bisa disalahkan kepada satu pihak. Sebab, baik masyarakat maupun pemerin-

### Ag Budi Susanto

tah harus bersatu dengan para rimbawan untuk kembali mewujudkan hutan lestari.

Sebagai contoh untuk kegiatan menjaga kelestarian hutan utamanya lingkungan hidup warga masyarakat digugah kesadarannya. Hutan merupakan warisan nenek moyang untuk anak cucu kita, maka seluruh warga masyarakat harus terus menjaga hutan agar tidak rusak atau punah.

Perlunya gerakan penanaman hutan kepada masyarakat. Di sekolah para siswa dilibatkan menanam di lahan kosong guna menjaga kelestarian alam ini. Misalnya diadakan camping kemudian disisipkan kegiatan penanaman pohon di hutan sekitar tempat camping. Kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan ini harus kita tanamkan sejak dini.

Penanaman kesadaran memelihara hutan dari kalangan para siswa tentu akan memiliki hasil yang lebih baik. Setiap pelajar ditanamkan kesadaran ini akan berimplikasi kepada orangtua juga. Harapannya semakin banyak yang sadar maka akan semakin terpelihara kelangsungan hutan kita. Para oknum yang merusak hutan juga harus diberi sanksi yang tegas agar hutan tetap terjaga dengan baik. Mereka dihukum berat sehingga menjadi jera, supaya hutan kita akan terus terjaga dengan baik.

Anggapan keliru hutan sebagai sumber ekonomi yang cepat, mudah, dan murah, harus diluruskan agar sumberdaya hutan yang dipandang sebagai kawasan terbuka yang bebas dimanfaatkan, harus dibuka wawasan mereka. Dalam pandangan ini masyarakat merasa berhak atas pemanfaatan hutan tanpa mengindahkan aturan atau norma. Akibatnya mereka mengeksploitasi hutan semauanya tanpa

mempertimbangkan dampak negatifnya.

Anggapan yang keliru itu harus kita luruskan. Karena ini bertentangan dengan tujuan utama pengelolaan sumberdaya hutan. Sumberdaya hutan mempunyai tiga fungsi. Pertama, secara ekonomi sumber daya hutan diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, secara ekologi sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Ketiga, secara sosial budaya sumberdaya hutan diharapkan dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui sistem dan praktek pengelolaan hutan.

Ketiga fungsi tersebut harus dimanfaatkan secara adil dan demokratis dengan tetap menjunjung tinggi kelestarian dan keberlanjutan hutan sehingga dapat dinikmati oleh semua generasi sekarang maupun yang akan datang. Kesadaran seluruh warga sangatlah dibutuhkan untuk tetap menjaga hutan dengan baik. (\*)

\*) **Ag Budi Susanto Spd.** Guru SMP Pangudi Luhur Sedayu Jln Wates Km 12 Sedayu Bantul.

## Pojok KR

MPR akan kawal Pemilu sesuai jadwal.  
-- UU jangan dibuat mulur mungkrat.

\*\*\*

DIY siap sukseskan G20 di Yogya.  
-- Harus siap, karena salah satu peluang DIY untuk bangkit.

\*\*\*

Gunungkidul luncurkan bus layanan gratis bagi sekolah.  
-- Hemat, sekaligus kurangi lakalantas.

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langgan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.